

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM & HAM
D.I. YOGYAKARTA**

**RENCANA
KERJA (RENJA)
T.A. 2023**



DAFTAR ISI

- Gambaran Umum2
- Maksud dan Tujuan3
- Ruang Lingkup4
- Dasar Hukum4
- Kegiatan yang Dilaksanakan5
- Hasil yang Dicapai.....6
- Kesimpulan.....16

Gambaran Umum

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga. Sebagai penjabaran dari RPJM, RKP memuat rencana dan prioritas pembangunan yang dibagikan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Renja K/L tahun 2023 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan sebagai wujud penjabaran tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMN dan Renstra 2020-2024 yang dituangkan kedalam dokumen Renja. Renja merupakan suatu upaya menjaga kesinambungan program dan kegiatan secara sistematis dan responsif terhadap kondisi dan situasi.

Penyusunan Renja K/L TA 2023 memperhatikan hal-hal Sasaran dan Prioritas Pembangunan tahun 2023. Adapun tema yang diusung dalam pembangunan RKP tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Selain itu, dalam penyusunan Renja TA 2023 agar terus melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman penerapan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).

Maksud & Tujuan

A. MAKSUD

Penyusunan Renja T.A. 2023 ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinkronkan dokumen perencanaan dan penganggaran khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan target dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Unit Pusat. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya anggaran Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta yang fokus dan tepat sasaran dan fleksibel, serta penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, akuntabel dan transparan.

B. TUJUAN

Tujuan tersusunnya Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2023 agar perencanaan penganggaran sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi terhadap data dan informasi perencanaan penganggaran satuan kerja Kantor Wilayah, dan sebagai referensi untuk melakukan penyusunan RKA-K/L tahun selanjutnya, serta untuk penilaian kinerja oleh para Stake Holders.

Ruang Lingkup & Dasar Hukum

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Rencana Kerja T.A. 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah penyusunan anggaran dan kinerja dalam perspektif Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP).

DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L;
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM;
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 9) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023; dan
- 10) Surat Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas nomor B-517/M.PPN/D.8/PP. 04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran nomor S-122/MK.2/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja TA 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Penyusunan analisa kebutuhan anggaran TA 2023 dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Indikatif TA 2023. Analisa Kebutuhan Anggaran TA 2023 Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta disusun oleh setiap Bagian/Bidang dari seluruh Divisi sesuai dengan masing-masing Program yang diemban;
- 2) Penyusunan Pagu TA 2023. Terdapat 3 tahapan penyusunan Pagu yaitu Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Pagu yang merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui dan sebagai acuan pendanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Renja;

Selain melalui mekanisme tersebut diatas, penyusunan Renja juga berpedoman pada kerangka pendanaan Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja sebagai pedoman strategi percepatan pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kualitas 4 program utama yang diemban di Kantor Wilayah. Kantor Wilayah c.q. Divisi Administrasi bertanggungjawab penuh atas Renja yang telah disusun serta memastikan Renja yang telah disusun oleh masing-masing Divisi benar dan valid.

Hasil yang Dicapai

Penyusunan Rencana Kerja TA 2023 di Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta terbagi dalam 2 kerangka utama, yakni Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Penganggaran.

A. Perencanaan Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		
2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM		
5252 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	
	Indeks Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah	82
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
3	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	
	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2023
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
5	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	663 Layanan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
6	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan
4841 - Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah		
7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%

PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI		
5256 - Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		
1	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah		
2	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
3	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang
PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM		
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		
1	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
	jumlah kab/kota peduli HAM	3
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1
2	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3

B. Perencanaan Anggaran

Pagu Alokasi T.A. 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta ditetapkan sejumlah **Rp 31.776.144.000,-** dengan rincian per Belanja sebagai berikut:

✚ Belanja Pegawai (001)	: Rp 15.323.801.000,-
✚ Belanja Operasional (002)	: Rp 3.982.205.000,-
✚ Belanja Non Operasional Tusi	: Rp 12.331.138.000,-
✚ Belanja Modal	: Rp 139.000.000,-

Adapun rincian per Program sebagai berikut:

1) Program Dukungan Manajemen

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen		21.860.741.000
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM		21.860.741.000
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan	20.072.947.000
1558.EBA.956	Layanan BMN		227.915.000
1558.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat		274.834.000
1558.EBA.959	Layanan Protokoler		144.232.000
1558.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		19.700.000
1558.EBA.962	Layanan Umum		100.260.000
1558.EBA.994	Layanan Perkantoran		19.306.006.000
001	Gaji dan Tunjangan		15.323.801.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3.982.205.000
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10 Unit	139.000.000
1558.EBB.951	Layanan Sarana Internal		139.000.000
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	214 Orang	649.508.000
1558.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		649.508.000
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	999.286.000
1558.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		369.114.000
1558.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		288.956.000
1558.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		198.735.000
1558.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		142.481.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen		261.246.000
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah		261.246.000
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4 Rekomendasi Kebijakan	261.246.000
5248.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		199.330.000
5248.ABD.002	Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		61.916.000

2) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.429.950.000
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		2.429.950.000
5251.AEA	Koordinasi	8 Kegiatan	287.684.000
5251.AEA.001	Koordinasi Divyankum Dengan Instansi Terkait		287.684.000
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4 Layanan	1.069.086.000
5251.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum Di Wilayah		1.069.086.000
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1 Perkara	6.540.000
5251.BCB.001	Penanganan Perkara Pada Kantor Wilayah		6.540.000
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	1 Perkara	1.066.640.000
5251.BIC.001	Pengawasan Kenotariatan Pada Majelis Pengawas Di Wilayah		1.066.640.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		869.208.000
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		869.208.000
5252.AEA	Koordinasi	10 Kegiatan	299.086.000
5252.AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah		299.086.000
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60 Orang	295.104.000
5252.AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah		295.104.000
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	275.018.000
5252.BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah		275.018.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		1.136.825.000
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		1.136.825.000
5254.AEA	Koordinasi	26 Kegiatan	753.341.000
5254.AEA.002	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian		753.341.000
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	13 Operasi	325.474.000
5254.BHB.U01	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Di Wilayah		151.304.000
5254.BHB.U02	Operasi Mandiri Di Wilayah		54.840.000
5254.BHB.U03	Operasi Gabungan Di Wilayah		93.320.000
5254.BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah		26.010.000
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2 Laporan	58.010.000
5254.BKA.001	Pengawasan Orang Asing		58.010.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.140.998.000
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		2.140.998.000
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2000 Orang	2.003.289.000
5253.BDC.001	Diseminasi Kekayaan Intelektual Di Wilayah		1.251.305.000
5253.BDC.002	Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		197.636.000
5253.BDC.003	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		554.348.000
5253.BKB	Pemantauan produk	5 Laporan	137.709.000
5253.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		137.709.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.360.324.000
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum		2.360.324.000
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	133.134.000
4841.BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum		102.350.000
4841.BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum		30.784.000
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	22 Lembaga	137.883.000
4841.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum		137.883.000
4841.BMA	Data dan Informasi Publik	6 Layanan	110.547.000
4841.BMA.001	Fasilitasi JDIHN		93.192.000
4841.BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum		17.355.000
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	210 Orang	1.680.000.000
4841.QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		1.680.000.000
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	28 Kegiatan	298.760.000
4841.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		298.760.000

3) Program Pembentukan Regulasi

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi		320.000.000
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		320.000.000
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	19 Rekomendasi Kebijakan	273.846.000
5250.ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah		273.846.000
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	25 Orang	46.154.000
5250.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah		46.154.000

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		156.957.000
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		156.957.000
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	41.711.000
5256.ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah		41.711.000
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	115.246.000
5256.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		115.246.0

4) Program Pemajuan dan Penegakan HAM

Kode	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Volume Output	Anggaran
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		239.895.000
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		239.895.000
5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1 Rekomendasi Kebijakan	14.190.000
5255.ABD.003	Rekomendasi Analisis Produk Hukum Di Daerah		14.190.000
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1 Layanan	48.103.000
5255.BAH.001	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah		48.103.000
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3 Lembaga	134.502.000
5255.BDB.002	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah		134.502.000
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	43.100.000
5255.FBA.001	Pengumpulan Data Dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM		43.100.000

Kesimpulan

Renja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta TA 2023 yang telah disusun diharapkan responsif dalam memberikan pelayanan kepada publik serta mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, Renja menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan program dan pencapaian target pembangunan pada periode tahun sebelumnya serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk tahun berikutnya.

Secara khusus penyusunan Renja TA 2023 tetap terus melakukan penguatan restrukturisasi dan redesain program dengan melibatkan seluruh unsur admistratif dan fasilitatif Unit Eselon I di lingkungan Kantor Wilayah dari awal hingga akhir penyusunan. Oleh karena itu, dokumen Renja K/L ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan acuan baik oleh Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta maupun pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terakhir, akan segera dilakukan evaluasi Renja tahun 2022 pada tahun berjalan, untuk mensinkronkan kembali indikator dan target yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi tersebut kiranya dapat dijadikan dasar perbaikan dalam penyusunan Renja tahun yang akan datang.

Yogyakarta, 6 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah



Agung Rektono Seto